

**EVALUASI PROGRAM PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA PADA
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DI DESA KERJO LOR, KECAMATAN
NGADIROJO, KABUPATEN WONOGIRI**

Afriana Artamevia Meylanda¹, Hartuti Purnaweni²
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Youth PIK program in the Quality Family Village which is still not running well. This study aims to evaluate the Youth PIK program in the Quality Family Village in Kerjo Lor Village, Ngadirojo District, Wonogiri Regency. This research uses program evaluation theory according to (D. L. Stufflebeam, 2013), which has four indicators, namely context, input, process, and product. This type of research is descriptive qualitative, using three types of data collection, namely interviews, documentation, and observation. The research findings highlight that the implementation of the Youth PIK program in Kerjo Lor Village still experiences obstacles in the sub-indicators, namely the needs of adolescents, government constraints, social and economic conditions, resources for implementing the Youth PIK program still have low resource capacity, the level of youth participation and activity management is still low, and there are still obstacles in the benefits provided to adolescents regarding the Quality Family Village Youth PIK program in Kerjo Lor Village. The conclusion of this research is that there are still obstacles in the implementation of the Youth PIK program in the Quality Family Village in Kerjo Lor Village, so there must be improvements in these problems.

Keywords: PIK-Teenager, Quality Family Village, Program Evaluation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. Salah satu aspek terpenting dalam proses ini adalah pembangunan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan fakta dilapangan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pembangunan daerah dilakukan dengan menganalisis kondisi serta peluang yang ada di setiap wilayah. Adanya pembangunan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan menciptakan keadilan (Mahadiansar et al., 2020)

Pembangunan sumber daya manusia juga didasari pada pembentukan RPJMN Indonesia Tahun 2020-2024 yang mengagaskan visi misi melalui

pengembangan kualitas sumber daya manusia; melakukan peningkatan pada struktur ekonomi; membangun daya saing; dan memberikan perlindungan untuk negara. Untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pemerintah memperbaiki layanan dasar di beberapa aspek, seperti aspek kesehatan dan kesehatan. Alasannya karena beberapa wilayah di Indonesia masih mempunyai permasalahan yang kompleks dan belum dapat teratasi dengan baik salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah masih mempunyai permasalahan yang menghambat pembangunan nasional, khususnya masalah pada kelompok umur remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan terdapat 10,3 juta penduduk atau setara dengan 30% dari total penduduk masih banyak yang berada dibawah umur 18 tahun. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang dapat menurunkan permasalahan ini guna dapat mencapai pembangunan nasional. Masalah ini dipicu dari kasus pernikahan usia dini di Jawa Tengah yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah bahwa terdapat kasus pernikahan dini mencapai 12.972 kasus

pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 berjumlah 13.595 kasus.

Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu kabupaten yang terletak dieks-Karesidenan Surakarta dan masih marak terjadi pernikahan dini. Faktanya jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten yang ada pada eks-Karesidenan Surakarta, angka pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri menempati urutan pertama sehingga dapat disimpulkan bahwa, pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri masih terbilang sangat besar. Untuk persentase data pernikahan usia dini di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta

Tabel 1. 2 Persentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Wanita berumur di bawah 16 Tahun yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Surakarta (Persen).			
	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Boyolali	11,05	9,29	9,94	11,40
Kabupaten Klaten	6,57	6,69	5,99	7,85
Kabupaten Sukoharjo	4,70	6,90	8,49	7,23
Kabupaten Wonogiri	15,27	14,71	15,85	14,54
Kabupaten Karanganyar	8,73	9,19	8,88	8,76
Kabupaten Sragen	14,07	15,99	13,40	14,34
Kota Surakarta	5,40	3,51	5,37	4,02

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa Kabupaten Wonogiri menduduki posisi pertama dengan jumlah pernikahan usia dini terbanyak dari Kabupaten/Kota lain di eks-Karesidenan Surakarta. Selain itu, standar rata-rata pernikahan dini yang ada di Kabupaten Wonogiri juga melebihi batas yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 14,54%, sedangkan standar pemerintah hanya 8.74% sehingga diperlukan strategi untuk menurunkan kasus pernikahan usia dini ini. Salah satu desa yang memiliki permasalahan pernikahan dini yaitu Desa Kerjo Lor. Desa Kerjo Lor berada di Kabupaten Wonogiri, khususnya berada di Kecamatan Ngadirojo.

Kasus pernikahan dini menurut penelitian lain sebagaimana menurut Rahma Intaningrun et al. (2024), pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri marak terjadi karena adanya faktor budaya dan hamil di luar nikah. Menurut Awaliyah Putri et al. (2024) pernikahan dini terjadi karena didominasi oleh pergaulan bebas sehingga remaja banyak hamil di luar nikah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini memang terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal sehingga dapat dicegah melalui upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan pernikahan dini kepada remaja. Upaya pencegahan

permasalahan remaja khususnya pernikahan dini dapat melalui program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Des Kerjo Lor.

Program PIK Remaja Desa Kerjo Lor adalah sebuah program yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dibidang remaja. Pemberdayaan masyarakat memerlukan langkah-langkah yang tepat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pemberdayaan masyarakat dalam Hardiyanti et al. (2022), suatu konsep pembangunan dengan merangkum nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat kemudian mencerminkan paradigma pembangunan yang bersifat *people centered*. *People centered* yaitu memusatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan.

PIK Remaja digunakan sebagai wadah untuk memberdayakan dan mengedukasi remaja melalui kelompok kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pembinaan tumbuh kembang anak, remaja. Selain itu, pengembangan PIK Remaja yaitu untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. Program PIK Remaja dapat memberikan efek dalam jangka panjang karena remaja dapat menghadapi masalah kesehatan mental, pergaulan bebas, atau tekanan sosial. Tanpa edukasi dan bimbingan yang diberikan oleh PIK Remaja,

terdapat potensi peningkatan angka pernikahan dini di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Kerjo Lor sehingga hal ini dapat berdampak pada kualitas hidup remaja dan keberlanjutan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan remaja di Kabupaten Wonogiri berkaitan erat dengan Desa Kerjo Lor karena juga menjadi bagian dari permasalahan di kabupaten. Permasalahan ini berkaitan dengan program PIK Remaja dan digunakan sebagai langkah awal dalam memberdayakan remaja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Wonogiri khususnya remaja di Desa Kerjo Lor sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat menganalisis **“Evaluasi Program Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas Di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.”** Hal tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami remaja di Desa Kerjo Lor yang masih kerap terjadi. Evaluasi program ini menjadi salah satu bukti apakah program program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas sudah dapat memberikan solusi dari permasalahan yang dialami remaja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengevaluasi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.
2. Menjelaskan faktor penghambat dalam evaluasi program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri.

D. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3), proses untuk mengatur organisasi dan sumber daya publik, yang berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik menurut kedua ahli tersebut, merupakan bidang seni dan ilmu yang bertujuan untuk mengatur urusan publik dan melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Tujuan dari ilmu administrasi publik yaitu untuk menyelesaikan masalah di ranah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan organisasi, sumber daya manusia dan pendanaan.

2. Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003: 22) kebijakan publik terdiri dari berbagai pilihan yang memiliki keterkaitan yang dirancang oleh pemerintah dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab lembaganya. Dalam kebijakan publik terdapat tahapan perumusan kebijakan. Proses perumusan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena mengikutsertakan banyak proses maupun permasalahan yang perlu dikaji.

3. Evaluasi Program

Menurut Denzin (2009) mengatakan bahwa evaluasi program dapat menjawab kekhawatiran para pembuat kebijakan dan penyandang dana karena biasanya melibatkan pertanyaan yang kasual mengenai program mana yang mencapai tujuan yang diinginkan. Penilaian pada setiap tahap evaluasi didasarkan pada tiga tahap indikator evaluasi kinerja yakni rendah, sedang, dan tinggi.

Menurut D. L. Stufflebeam (2013) model yang digunakan untuk mengevaluasi program yaitu Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Tujuannya adalah untuk menilai dan mengembangkan manfaat program, menyediakan informasi yang bertujuan untuk memperoleh keputusan alternatif, dan mengembangkan kebijakan program. Model Evaluasi CIPP meliputi:

1. Evaluasi konteks berkaitan dengan penyediaan informasi supaya dapat mencapai tujuan. Informasi yang diperoleh dengan mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan program, kendala, kondisi, maupun isu yang terjadi dalam lingkungan program.
2. Evaluasi input merupakan kegiatan evaluasi yang berkaitan dengan identifikasi aset, permasalahan, dan peluang yang dapat membantu para

pengambil keputusan untuk mendefinisikan tujuan, prioritas, rencana, maupun alternatif dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditargetkan.

3. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang berupaya dalam pemantauan kembali pelaksanaan program, peninjauan kembali rencana organisasi, serta evaluasi yang telah dilakukan.
4. Evaluasi produk merupakan evaluasi akhir dari suatu program yang berkaitan dengan identifikasi terhadap keluaran maupun manfaat dari program atau proyek, baik hasil yang direncanakan maupun tidak direncanakan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

4. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja)

PIK-Remaja merupakan wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja dengan tujuan untuk memberikan layanan berupa informasi dan konseling kesehatan reproduksi dan persiapan kehidupan berkeluarga. Tujuan diadakan program PIK Remaja sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan PIK Remaja dalam mengembangkan materi melalui program GenRe;

- Meningkatkan kemampuan inovasi dan kreativitas remaja;
- Meningkatkan minat dan bakat remaja dalam setiap kegiatan dan pengelolaan PIK Remaja (BKKBN, 2023)

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2021) metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang terdiri atas seperangkat teks, dokumen, foto ataupun informasi yang dikemukakan oleh para narasumber dalam menjelaskan seberapa jauh keberhasilan capaian tujuan program.

Menurut Sugiyono (2020) teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan jenis *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Program PIK Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor

Mengutip dari Suharsimi Arikunto (dalam Rianto et al., 2019), evaluasi program merupakan rentetan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk melihat tingkat keberhasilan program. Evaluasi program bertujuan untuk melihat sumbangan program untuk pencapaian tujuan organisasi. Hasil dari evaluasi ini dapat dikembangkan ke dalam program yang sama di tempat lain. Selain itu, dengan adanya evaluasi ini dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan mengenai keberlanjutan sebuah program, apakah harus diberhentikan atau diperbaiki.

Dalam penelitian ini, program pusat informasi dan konseling remaja menjadi penentu evaluasi keberhasilan dari suatu program. Apabila dalam evaluasi program ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan, maka program ini dapat dioptimalkan untuk pelaksanaannya. Namun, jika evaluasi program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk kelangsungan program ini dapat diberhentikan. Untuk mengukur keberhasilan evaluasi dari pusat informasi dan konseling pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor ini

menggunakan teori dari (Stufflebeam, 2013) yang mengukur keberhasilan evaluasi dengan empat indikator, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Oleh karena itu, dapat mencetuskan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konteks

Kebutuhan yang diperlukan oleh remaja dalam program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor itu bervariasi, misalnya dalam aspek edukasi kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan dukungan psikologis. Bentuk nyata untuk pemenuhan kebutuhan ini terlihat pada saat sosialisasi dan diskusi kelompok yang diadakan oleh pemerintah desa. Program ini menjadi wadah yang efektif bagi remaja dalam mendapatkan informasi dan pengalaman. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua remaja mengetahui program PIK Remaja dan aktif untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Faktanya beberapa remaja enggan untuk mengikuti kegiatan diskusi juga dikarenakan terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal ini mencerminkan bahwa program PIK Remaja berusaha untuk memenuhi kebutuhan remaja, tetapi ada hambatan yang berdampak pada keberlangsungan pemenuhan kebutuhan tersebut.

Bukti yang kuat menunjukkan adanya hambatan dalam kurangnya sumber

daya yang ada di dalam pelaksanaan program PIK Remaja, karena sumber daya fasilitas yang disediakan jauh dari kata memadai. Artinya banyak meja dan kursi yang sudah lapuk, toilet yang tidak ada air dan tampilannya yang kotor. Namun dalam evaluasi konteks, adanya hambatan ini menjadi penting karena untuk proses identifikasi strategi yang diperlukan.

2. Input

Program PIK Remaja ini memperlihatkan kondisi yang belum optimal karena masih terdapat hambatan dalam aspek sumber daya manusia. Misalnya keterbatasan jumlah fasilitator yang tersedia dan kemampuan fasilitator masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, harus ada peningkatan kualitas kader program Kampung Keluarga Berkualitas agar dapat memaksimalkan program PIK Remaja. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia harus seimbang jika ingin mencapai keberhasilan program PIK Remaja di Kampung Keluarga Berkualitas ini.

PIK Remaja Desa Wonogiri berjalan memang menggunakan dana desa yang disediakan oleh pemerintah desa dan disalurkan kepada pengelola kampung keluarga berkualitas khususnya program PIK Remaja. Namun faktanya, hal ini

masih mengalami krisis kurangnya dana operasional untuk menjalankan program.

Fasilitas PIK-Remaja Desa Kerjo Lor telah disediakan oleh pemerintah dalam menunjang keberhasilan program PIK Remaja. Hanya saja fasilitas kegiatan yang ada tidak memadai dan tidak sesuai dengan standar pedoman. Bahkan untuk ruang konsultasi, tidak ada area privasi bagi remaja dan konsultan. Terbukti dari tidak memadai fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor.

Rendahnya partisipasi remaja dalam program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor yang disebabkan oleh kurangnya informasi secara menyeluruh kepada remaja, dan sosialisasi yang kurang menjadi minat remaja. Selain itu, dalam aspek pengembangan keterampilan dan inovasi remaja juga masih mengalami tantangan, yaitu adanya keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Padahal program ini menjadi pengembangan diri yang efektif bagi remaja. Penyediaan alternatif yang dilakukan oleh pengelola program PIK Remaja masih belum sesuai harapan untuk meningkatkan minat remaja berpartisipasi dalam program ini.

3. Proses

Program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup remaja dan keluarga, meskipun terdapat kendala dalam evaluasi yang kurang rutin dan efektif, sehingga pengukuran dampak program sulit dilakukan. Kendala lainnya mencakup keterbatasan waktu, rendahnya motivasi remaja, kurangnya dorongan dari lingkungan, dan minimnya sumber daya serta inovasi dalam kegiatan.

Tantangan ini ada, program ini berhasil meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Meskipun sebagian besar tujuan program Kampung Keluarga Berkualitas tercapai, beberapa kegiatan belum memenuhi target, sehingga perbaikan diperlukan. Faktor manajerial seperti perencanaan yang kurang matang dan kurangnya dana operasional juga mempengaruhi efektivitas kegiatan. Oleh karena itu, perbaikan dalam manajemen dan evaluasi sangat diperlukan agar program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan hasil yang maksimal bagi remaja di desa tersebut.

4. Produk

Program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor mengalami dampak positif, namun masih menghadapi tantangan signifikan.

Beberapa remaja terpengaruh oleh kelompok sebaya yang mendorong perilaku menyimpang, seperti pergaulan bebas dan konsumsi alkohol, yang menghambat efektivitas program. Selain itu, sebagian remaja merasa kegiatan ini kurang menarik, membuang waktu, dan belum menyentuh seluruh wilayah desa, sehingga mengurangi partisipasi mereka. Perubahan sosial yang terjadi belum sepenuhnya optimal karena pengaruh kelompok tersebut masih kuat. Untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, diperlukan evaluasi program yang relevan dan upaya konstruktif untuk mengatasi hambatan ini serta meningkatkan dampak positif yang lebih luas dan berkelanjutan.

B. Faktor Penghambat Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

b.

1. Kurangnya Pemahaman Kader

Kader atau fasilitator tidak diberikan pelatihan secara optimal, maka hal ini akan berdampak kepada proses pelaksanaan program yang kurang efektif dan tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan remaja. Oleh karena itu, pelatihan diharuskan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan program PIK

Remaja. Alasannya jika fasilitator mendapatkan pelatihan yang berkelanjutan, maka juga akan meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan informasi. Selain itu, fasilitator tidak mempunyai keterampilan yang cukup, maka pelaksanaan program akan berkurang, baik dalam proses pelaksanaan maupun pencapaian hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan keterampilan bagi tenaga pelaksana melalui pelatihan yang berkelanjutan agar program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi remaja.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor, pengetahuan kader yang masih kurang karena kurang mendalami informasi saat berkegiatan sehingga program PIK Remaja menjadi kurang efektif. Sehingga dibutuhkan solusi untuk meningkatkan keberhasilan program PIK Remaja untuk mencapai tujuan. Selain itu, program PIK Remaja Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor perihal komitmen belum berjalan dengan baik karena masih banyak kader atau fasilitator yang ketika berkegiatan itu belum dapat mengendalikan emosi mereka padahal sebelumnya sudah ada pelatihan. Masalahnya para kader juga menghadapi remaja yang masih memiliki emosi yang

belum stabil. Hal ini menjadi perhatian bagi pengelola kegiatan PIK Remaja untuk dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Masih ada kader yang kesulitan mengoperasikan teknologi canggih yang mendukung kelancaran kegiatan, serta kurangnya pengalaman dalam mengelola kegiatan yang lebih kompleks, terutama bagi kader yang lebih muda. Di sisi lain, kader yang lebih tua terkadang kurang familiar dengan perkembangan teknologi. Selain itu, keterampilan *public speaking* yang belum maksimal menjadi hambatan dalam menyampaikan materi dengan efektif kepada kelompok yang lebih besar. Untuk meningkatkan *output* program, pengembangan keterampilan teknologi dan komunikasi perlu menjadi fokus utama

3. Adanya Dominasi Pemerintah

Proses pengambilan keputusan dalam program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor belum melibatkan masyarakat secara maksimal. Kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat membuat mereka pasif dalam pengambilan keputusan, sehingga dominasi pemangku kepentingan yang lebih memahami program menjadi hal yang umum. Selain itu, program ini menghadapi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan karena belum adanya kebijakan yang jelas serta kurangnya

koordinasi antara pemerintah desa, dinas terkait, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Hal ini menghambat upaya penurunan angka pernikahan dini. Evaluasi yang hanya dilakukan setahun sekali juga memperlambat respons terhadap perubahan di lapangan, menghalangi penyesuaian strategi untuk meningkatkan efektivitas program.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja Pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat diperoleh bahwa keempat indikator evaluasi program menurut (Stufflebeam, 2013) pada indikator konteks, input, proses, dan produk belum berjalan dengan baik sebagai berikut:

a. Konteks. Program PIK Remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor mempunyai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan remaja dalam hal pegedukasian mengenai kesehatan reproduksi dan pengembangan keterampilan bagi remaja. Namun dalam pelaksanaannya, program ini belum berjalan dengan baik yang sesuai

denga kebutuhan remaja, tujuan dari PIK Remaja itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan yang diinginkan remaja di Desa Kerjo Lor.

- b. Input.** Program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor secara keseluruhan masih mempunyai banyak kekurangan. Dilihat dari evaluasi input yaitu pada indikator sumber daya tidak ada pengelolaan yang tepat terhadap program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor. Dalam hal sumber daya manusia pelaksanaan program PIK Remaja masih memiliki kapasitas kompetensi sumber daya yang rendah, meskipun dalam jumlah termasuk memadai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penguasaan di bidang teknologi belum mahir, banyak karyawan atau kader yang terlatih mutasi kerja, dan faktor usia kader.
- c. Proses.** Program PIK Remaja di Desa Kerjo Lor menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup remaja dan keluarga, meskipun terdapat kendala dalam evaluasi yang kurang rutin dan efektif, sehingga pengukuran dampak program sulit dilakukan. Kendala lainnya mencakup keterbatasan waktu, rendahnya

motivasi remaja, kurangnya dorongan dari lingkungan, dan minimnya sumber daya serta inovasi dalam kegiatan.

d. Produk. Secara keseluruhan program PIK Remaja sudah memberikan efek positif kepada penerima program. Namun ada hasil jawaban yang menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala sehingga dampak yang diterima menjadi kurang maksimal. Sebagian besar remaja mengatakan kegiatan ini memberikan pemahaman tentang kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Namun ternyata, masih ada kendala dalam manfaat yang diberikan kepada remaja mengenai program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor.

Faktor Penghambat Evaluasi Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri

Evaluasi program pusat informasi dan konseling remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor dipengaruhi oleh faktor penghambat. Adapun faktor penghambat dari evaluasi program PIK Remaja, antara lain pemahaman program yang masih kurang, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan adanya dominasi pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan terhadap evaluasi program kegiatan pusat informasi dan konseling remaja pada kampung keluarga berkualitas di Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat membangun kemitraan yang lebih erat dengan sektor swasta dan masyarakat dalam rangka pembuatan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan efektivitas program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor. Kerjasama ini akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk menjalankan program secara optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
2. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan untuk memperbaiki pengelolaan anggaran Program PIK Remaja pada Kampung Kampung Berkualitas di Desa Kerjo Lor dengan meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan dana, serta memastikan proses perencanaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan desa. Selain itu, perlu ada pelatihan bagi pengelola anggaran untuk meningkatkan kapasitas dalam menyusun dan melaporkan anggaran secara tepat guna. Monitoring dan evaluasi yang rutin sangat penting untuk memastikan dana digunakan secara efektif, terutama untuk memperbaiki atau menyediakan fasilitas yang mendukung program PIK Remaja. Kolaborasi dengan lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap program PIK Remaja pada Kampung Keluarga Berkualitas di Desa Kerjo Lor juga dapat memperkuat program ini melalui dukungan tambahan, baik dari segi dana maupun fasilitas.

3. Pemerintah Desa Kerjo Lor untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui berbagai media, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai agen perubahan, serta menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi kader PIK Remaja agar lebih siap dalam mengedukasi remaja. Selain itu, perlu disediakan akses informasi yang mudah dipahami terkait manfaat

program KB, serta memberikan insentif atau penghargaan bagi mereka yang aktif berpartisipasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan program ini dapat lebih efektif dan menarik minat lebih banyak warga untuk terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah Putri, H., Purnaweni, H., & Rina Herawati, A. (2024). *Network Governance Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Lamongan*. Universitas Dipoengoro.
- BKKBN. (2023). *Pembinaan PIK Remaja (Pusat Informasi dan Konseling Remaja)*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/38915/intervensi/526879/pembinaan-pik-r-pusat-informasi-dan-konseling-remaja>
- Denzin, N. K. dan Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hardiyanti, K., Purnaweni, H., & Sundarso. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Sektor Pariwisata Balkondes Giritengah di Kecamatan Borobudur kabupaten Magelang. *Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 49–60.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik : Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta Gava Media.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia.

Ilmu Administrasi, 17(1), 77–92.

Rahma Intaningrun, C. O., Purnaweni, H., & Rina Herawati, A. (2024). Efektivitas Kebijakan Batas Minimal Usia Perkawinan Terhadap Kasus Pernikahan Dini di Kabupaten Wonogiri. *Universitas Diponegoro*.

Rianto, F., Nengsih, N. S., & Setyadiharja, R. (2019). Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Dimensi*, 8(2).

Stufflebeam, D. L. (2013). *The CIPP model for evaluation. United States: Springer Pub. Inc.*

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D / Sugiyono (3rd ed.)*. Bandung: Alfabeta, 2021 ©2021.